

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan keuangan maupun akuntansi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan ini masih memiliki hubungan dengan kejadian sosial, dimana kejadian sosial memiliki pengaruh dalam perkembangan serta perubahan sistem akuntansi di suatu negara. Perkembangan yang signifikan baru saja terjadi pada tahun 2000an yaitu sejak ada pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah melakukan perubahan sistem dalam kegiatan penyelenggaraannya. Awalnya, pemerintah menerapkan sistem sentralisasi, dimana setiap kegiatan penyelenggaraan serta pengambilan keputusannya dilakukan oleh pusat. Sistem ini kemudian diubah menjadi sistem desentralisasi, dimana pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Setyowati et al., 2016).

Perkembangan sistem pemerintah, didukung juga oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi menyeluruh mengenai aturan dan standar yang harus ditetapkan. Dengan adanya otonomi daerah, itu berarti pemerintah daerah merupakan pelaku utama dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan ini, pemerintah daerah diharuskan untuk menjaga sikap transparan, dan

objektif guna terciptanya keefektifitasan kinerja pemerintah. Untuk mewujudkannya, dapat dilakukan berbagai cara salah satunya dengan membuat laporan keuangan. Pemerintah daerah saat ini sudah meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa tanggung jawab serta kinerja pemerintah pada periode tersebut sudah baik. Laporan keuangan ini dibuat pada setiap akhir periode anggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 dan Pasal 32 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa para pemimpin daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah yang telah diaudit kepada DPRD dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Komponen-komponen yang ada dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Badan yang bertanggungjawab dalam melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara yang independen dan professional didukung oleh TAP MPR No.VI/MPR/2002. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta

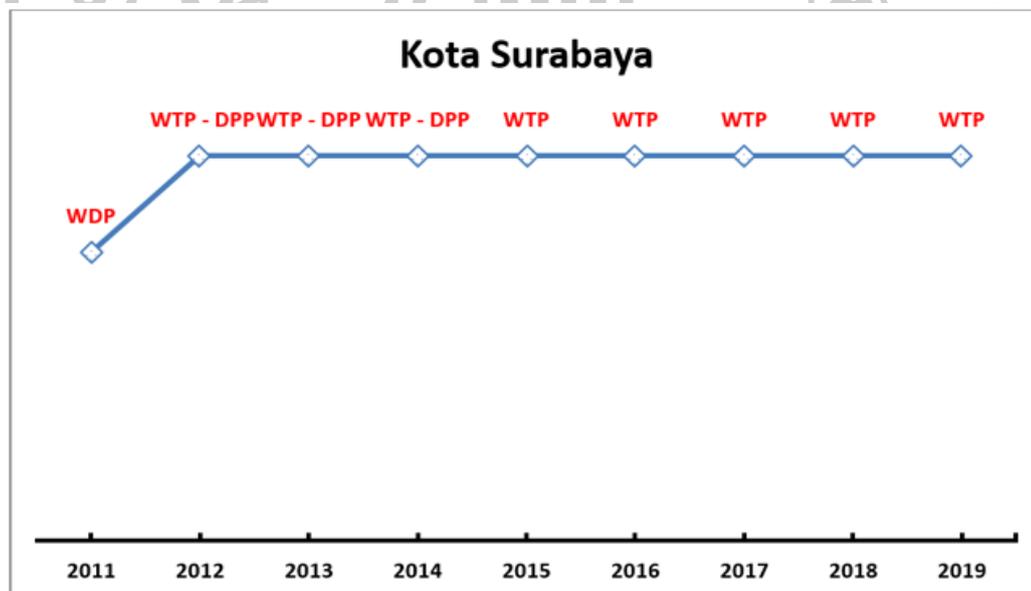
melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan professional. Dalam menjalankan tugasnya, BPK didukung oleh seperangkat undang-undang, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat oleh pemerintah dengan harapan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menyajikan informasi serta laporan yang berkualitas yang akan membantu pemerintah dalam penyusunan dan pengevaluasian kinerja serta kebijakan dalam pengelolaan pemerintah. Kualitas laporan keuangan dapat diartikan tingkat baik atau tidaknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan (Suhardjo, 2013). Sehingga, sesuai dengan tujuan tersebut diharapkan laporan keuangan yang disajikan merupakan laporan keuangan dengan kualitas terbaik.

Kualitas laporan keuangan sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban serta bukti pemerintah terhadap kinerjanya. Jika laporan keuangan yang terbitkan memiliki kualitas yang baik, maka akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan, menetapkan kebijakan atau peraturan di masa yang akan datang. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan maka bisa dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sendiri merupakan salah satu lembaga dinegara yang diberikan wewenang untuk memeriksa pengelolaan serta tanggungjawab keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). BPK

sendiri nantinya akan menerbitkan hasil audit, dimana hasil audit itu berupa opini. Opini dari BPK sendiri diantaranya yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Fenomena pada penelitian ini adalah peningkatan opini serta predikat WTP (Wajar tanpa Pengecualian) terbaik se-Jawa Timur yang didapat oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya dinilai dapat memberikan transparansi serta memiliki pengelolaan yang baik dalam keuangannya. Berikut merupakan data opini yang dikeluarkan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya:



Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/>

Gambar 1.1
DIAGRAM OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA SURABAYA 2011-2019

Gambar 1.1 merupakan diagram opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Dapat dilihat pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) yang menunjukkan kenaikan kualitas dalam laporan keuangan. Baru pada tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mana dapat disimpulkan terjadi kenaikan dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Opini WTP dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai pada tahun 2019 sesuai dengan data terbaru pada laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Kriteria kualitas laporan keuangan, selain dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah diatur di dalam bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan itu dapat membantu dalam kegiatan evaluasi, serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sementara, laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila bebas dari kesalahan yang material, serta menyajikan setiap informasinya secara tepat dan objektif. Selanjutnya, yaitu laporan keuangan haruslah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan haruslah mudah untuk dipahami oleh penggunanya.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, saat prakteknya didasari oleh teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*). Teori penetapan tujuan merupakan teori motivasi yang menekankan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa sasaran yang spesifik dan sulit menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa sasaran (Robins, 2014).

Beberapa faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, faktor politik dan peran teknologi informasi. Pengendalian internal yang baik, akan mendorong kinerja serta kepatuhan para pegawai agar terciptanya efisiensi serta efektivitas dalam bekerja. Pengendalian internal juga dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan serta pengamanan aset negara. Faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai keterampilan juga dapat menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sumber daya manusia mengambil peran yang besar dalam pembuatan laporan keuangan karena harus memastikan bahwa laporan keuangan mengandung kualitas nilai informasi yang baik. Laporan keuangan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor politik, dimana ditemukan adanya pengaruh dari pihak-pihak yang mempengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan. Dan terakhir, adanya peran teknologi yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi sangat membantu

dalam pengumpulan informasi, pengolahan data, bahkan pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan khususnya dalam pembuatan laporan keuangan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Hendri (2019); Setyowati et al. (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Hai & Trung, 2016) yang menyatakan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Agung (2018); Anggriawan & Yudianto (2018); Efendi et al. (2017); Febrian Cahyo Pradono & Basukianto (2015) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia serta teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu bertolak belakang dengan penelitian lainnya, (Jerry & Saidu, 2018) memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan (Setyowati et al., 2016) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari penelitian lainnya, digunakan variabel yang berbeda yaitu Faktor politik, dimana menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nirwana & Haliah, 2018) mendapatkan hasil yaitu faktor politik memiliki pengaruh dalam kualitas laporan keuangan. Dan bertolak belakang dengan (Umaroh, 2017) dengan hasil faktor politik tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya hasil penelitian yang tidak konsisten. Dimana, menurut penelitian (Hai & Trung, 2016) mendapatkan

hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Jerry & Saidu, 2018) menyatakan kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Umaroh, 2017) menyatakan faktor politik tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara menurut (Setyowati et al., 2016) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agung & Gayatri, 2018; Febrian Cahyo Pradono & Basukianto, 2015) menyatakan bahwa Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan (Nirwana & Haliah, 2018) menyatakan bahwa faktor politik berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Alasan selanjutnya mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan adalah, adanya variabel tambahan yaitu Faktor Politik dikarenakan masih jarang atau sedikitnya peneliti yang menggunakan variabel ini. Selain itu, belum adanya penelitian dengan variabel Faktor Politik menggunakan sampel Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai kesenjangan atau perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan meneliti lebih lanjut mengenai variabel yang jarang digunakan dalam meneliti kualitas laporan keuangan. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang melandasi penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya?
3. Apakah faktor politik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Politik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menguatkan penelitian sebelumnya, dan bisa dijadikan referensi dan tambahan ilmu baru bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa memberi pengetahuan baru tentang variabel-variabel yang diteliti dan melatih peneliti dalam berpikir kritis serta menemukan jalan keluar atau solusi yang tepat dari suatu permasalahan.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan di dalam institusi pemerintahan serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia serta Pengendalian Internal didalam lingkungan pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data

BAB IV PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan hasil serta pembahasan dari pengujian tersebut.

BAB V PENUTUP

Didalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.